

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (EPTSP) PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARO JAMBI

Fery Purnama¹⁾, Novri Adhiatma²⁾, Muhammad Ikhsan³⁾

Dosen Tetap Politeknik Jambi, Jambi 36121

E-mail: fery.purnama@politeknikjambi.ac.id¹⁾, novri@politeknikjambi.ac.id²⁾,
Ikhsan@politeknikjambi.ac.id³⁾

Abstract - *Technology is a tool that is used today to facilitate human work both in everyday life and in organizations. Currently, the services carried out by the Kejaksaan Muaro Jambi in serving the community still serve conventionally and require a long time, so that the services at the Kejaksaan Muaro Jambi are still divided into several parts and lack transparency. Based on this problem, the researcher will build a service system that can be accessed at one door as stated in the One Stop Service Implementation (PPTSP) in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 24 of 2006 and the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 188.32/498/V/Bangda concerning the Implementation Guidelines for the Minister of Home Affairs Number 24 of 2006, has goals and objectives to realize public services that are fast, cheap, easy, transparent, certain and affordable, as well as being able to improve the rights of the community in public services. Researchers have a goal to build an electronic information system for one-stop integrated services to facilitate and improve services to the public by the Kejaksaan Muaro Jambi. In building the system, the researcher will use the method in stages starting from data collection, needs analysis, system design, system design, and system implementation and testing until the system can run well. The system built can be accessed with only one portal by having many services in it without having to open service portals one by one and also the system built can be accessed from anywhere and anytime to make it easier for the public to report and get information from the Kejaksaan Muaro Jambi. The EPTSP of the Kejaksaan Muaro Jambi is very useful in improving service and employee performance as well as making it easier for the public to get information from the Kejaksaan Muaro Jambi quickly and accurately.*

Keywords : *System;Information;Electronic;Technology.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan adalah tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang meliputi beberapa aspek layanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelayanan publik pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur jelas, waktu ringkas, dan biaya terjangkau terus meningkat dari waktu ke waktu. Hak yang terus berkembang inilah bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pemerintah berkewajiban untuk melayani.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah khususnya di bidang administrasi pelayanan, perizinan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu. Tugas pemerintah dalam menyediakan pelayanan umum yaitu salah satunya dengan pembentukan pelayanan perizinan terpadu sebagai instansi yang khusus bertugas memberikan pelayanan informasi langsung kepada masyarakat [1]. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan bentuk usaha dalam menjalankan akitifitas pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya PTSP yang baik, pemerintah dapat melaksanakan pelayanan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakatnya.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat di era modern saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan adalah hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM).

Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan dan menggunakan teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pelatihan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu

berkembang secara beriringan dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Beberapa cara adaptasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan ataupun pendidikan.

Pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi saat ini sangatlah banyak mulai dari pengaduan masyarakat, izin besuk tahanan, kunjungan tamu, informasi jadwal sidang, informasi barang bukti, layanan pidana khusus, layanan pidana umum, layanan pidana perdata dan hukum negara serta konsultasi hukum. Pada saat ini pelayanan masih dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan cara masyarakat harus datang ke kantor untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu baru nanti akan diinformasikan kembali informasi yang di butuhkan masyarakat.

Dari uraian masalah diatas peneliti akan membangun satu unit sistem yang akan membantu dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat oleh Kejaksaan Muaro Jambi. System yang bangun dengan menggunakan metode secara bertahap dimulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, rancangan sistem, desain sistem, dan implementasi serta testing sistem hingga system dapat berjalan dengan baik. Sistem yang dibangun dapat diakses dengan 1 portal saja dengan memiliki banyak layanan di dalamnya tanpa harus membuka satu per satu portal layanan dan juga sistem yang dibangun dapat diakses dari mana saja dan kapanpun agar memudahkan masyarakat dalam melaporkan dan mendapatkan informasi dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. EPTSP Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sangat bermanfaat dalam peningkatan pelayanan dan juga kinerja pegawai serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dari Kantor Kejaksaan Negeri Muaro Jambi secara cepat dan akurat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu dan juga Jogiyanto (2005:8) mendefinisikan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.[2]

Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung samaorang lain dan terpadu.[3]

2.2. Pengertian Informasi

Menurut (Susanto, 2013), Informasi adalah data yang telah di klasifikasikan atau di interpretasi

untuk di gunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan maka informasi menjadi tidak diperlukan keputusan berkisar dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Nilai informasi di lukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Teori informasi lebih tepat di sebut teori matematis dan komunikasi. Sumber informasi adalah data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu di olah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi.[4]

2.3. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu system didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan.

Menurut Kadir (2014) Komponen-komponen sistem informasi adalah sebagai berikut :

1. Perangkat keras (*hardware*) perangkat keras adalah sebagai piranti fisik seperti komputer dan printer.
2. Perangkat lunak (*software*) yaitu sekumpulan intruksi-intruksi yang memungkinkan perangkat keras memproses data.
3. Prosedur (*procedure*) yaitu sekumpulan aturan yang di pakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
4. Orang (*brainware*) yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem informasi, pemrosesan data dan penggunaan keluaran sistem informasi.
5. Basis data (*database*) yaitu sekumpulan tabel-tabel lainnya yang saling berhubungan yang berkaitan dengan penyimpanan data.
6. Jaringan komputer dan komunikasi data (*network and communication*) yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) di pakai secara bersama atau di akses oleh sejumlah pemakai.[5]

Berdasarkan referensi-referensi teori yang telah dikemukakan oleh pakar. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebuah sistem informasi adalah komponen sistem yang berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan pengelolaan data suatu kelompok atau organisasi dengan kemampuan yang dapat meringkas waktu pelaksanaan dan menghasilkan olahan data yang lebih efisien.

2.4. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan serta disajikan secara manual ataupun elektronik.[6]

Prinsip-prinsip pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor public, termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar pengembangan *e-government* prinsip-prinsip tersebut ialah aksesibilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, dan akuntabilitas.[7]

2.5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan sebuah kebijakan reformasi terhadap pelayanan publik, khususnya dalam hal pelayanan perizinan yang di atur melalui peraturan perundangan secara nasional. Kebijakan PTSP secara nasional di atur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP merupakan payung hukum nasional mengatur tentang sistem pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjadi dasar hukum penyelenggaraan PTSP di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selanjutnya kebijakan mengenai kelembagaan PTSP secara khusus di atur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kelembagaan PTSP di daerah. Bentuk kelembagaan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 ditetapkan hanya boleh berbentuk Badan atau Kantor atau lembaga teknis daerah.[1]

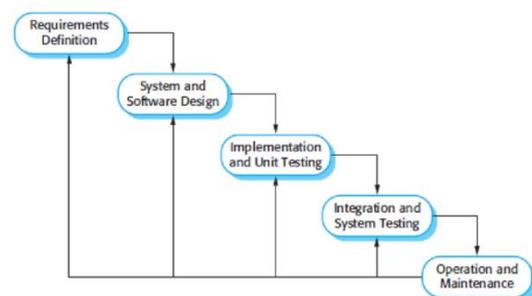
Pelayanan terpadu, bisa berbentuk pelayanan satu pintu (*one stop service* atau OSS) dan pelayanan satu atap (bersama). Pelayanan terpadu satu pintu, merupakan pola pelayanan yang diselenggarakan pada satu tempat, yang meliputi berbagai jenis pelayanan dan memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Pelayanan terpadu satu atap, merupakan pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat, yang meliputi berbagai jenis pelayanan dan tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.[8]

Menurut Taufiq Effendi (2008:83), sebagai tindak lanjut dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dilaksanakan pembentukan sistem layanan terpadu (*integrated services*) dan layanan cepat (*quick services*), yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang murah dan cepat.[9]

III. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode *Waterfall*. Metode *waterfall* merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematis dan sekuensial. Tahapan-tahapan pada metode *waterfall* sebagai berikut:

- 1) *Requirements analysis and definition*
Layanan sistem, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.
- 2) *System and software design*
Tahapan perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan.
- 3) *Implementation and unit testing*
Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya.
- 4) *Integration and system testing*
Unit-unit individu program atau program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan ke customer
- 5) *Operation and maintenance*
Tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang. Sistem dipasang dan digunakan secara nyata. *Maintenance* melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru.

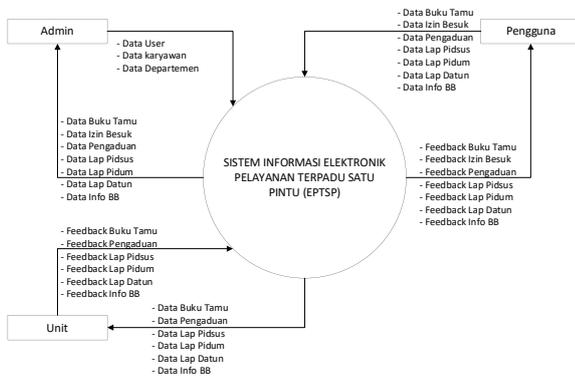


Gambar 1. Metode *Waterfall*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan sistem informasi yang dibangun dapat digambarkan dalam konteks diagram berikut yang pada pada suatu proses terdiri dari 3 entitas yang berinteraksi dengan proses atau sistem. Entitas

admin memberikan inputan data departemen, user dan karyawan. Entitas masyarakat memberikan data berupa identitas dan pengaduan yang akan disampaikan ke dalam *system*. Entitas unit memberikan respon kepada masyarakat sebagai pengguna agar informasi dapat diterima dengan baik. Berikut gambar konteks diagram selengkapnya.



Gambar 2. Konteks Diagram

Setelah rangkaian proses diuraikan dalam digram konteks di atas peneliti mulai melakukan rancangan tabel yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Tabel Pengaduan

Field	Type	Panjang	Keterangan
id_pm	int	5	primary key
kdtreg	varchar	10	nama departemen
nama	varchar	75	nama pelapor
nohp	int	15	nomor hp
email	varchar	50	email
alamat	text		alamat
judul	varchar	150	judul laporan
jenis	varchar	255	jenis laporan
isi	text		deskripsi laporan
file	varchar	100	file bukti
waktu	datetime		tanggal dan jam
status	varchar	25	status laporan
hasil	varchar	25	hasil laporan

Tabel 2. Tabel Departemen

Field	Type	Panjang	Keterangan
id_dept	varchar	10	primary key
nama_dept	varchar	50	nama departemen

Pada penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi pelayanan elektronik. Sistem ini berfungsi untuk membantu dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat oleh Kejaksaan Muaro Jambi. Adapun hasil rancangan sistem informasi elektronik pelayanan terpadu satu pintu pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi sebagai berikut:

1. Halaman Utama

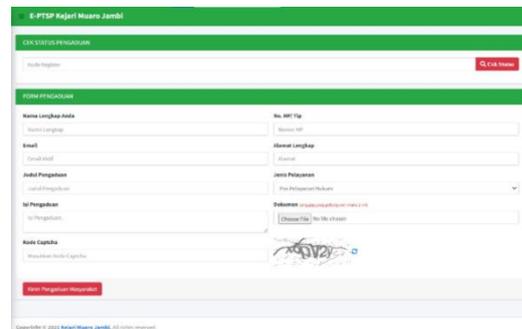
Halaman utama ini menampilkan menu-menu pelayanan pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi yang meliputi *Whistle blowing system*, izin besuk tahanan, info barang bukti, buku tamu online, jadwal sidang, layanan seksi pidana umum dan khusus, layanan seksi perdata & tata usaha negara, dan e-survey.



Gambar 3. Tampilan Halaman Utama EPTSP

2. Form Pengaduan Masyarakat

Form pengaduan masyarakat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan pada sistem.



Gambar 4. Form Pengaduan Masyarakat

3. Form Izin Besuk Tahanan

Form izin besuk tahanan digunakan untuk mengisi data-data masyarakat yang akan membesuk tahanan serta izin untuk membesuk tahanan.

Gambar 5. Form Izin Besuk Tahanan

Gambar 8. Form Layanan Pidana Khusus

4. Form Buku Tamu

Form buku tamu digunakan untuk mengisi data tamu-tamu yang sedang berkunjung dan pengisian buku tamu dilakukan secara *online*.

Gambar 6. Form Buku Tamu

7. Form Layanan Pidana Umum

Form layanan pidana umum digunakan untuk melakukan pengaduan terkait pidana umum pada sistem.

Gambar 9. Form Layanan Pidana Umum

5. Form Info Barang Bukti

Form info barang bukti digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan barang bukti terkait dengan kasus.

Gambar 7. Form Info Barang Bukti

8. Form Layanan Perdata dan Hukum Negara

Form layanan perdata dan hukum negara digunakan untuk melakukan pengaduan terkait layanan perdata dan hukum negara pada sistem.

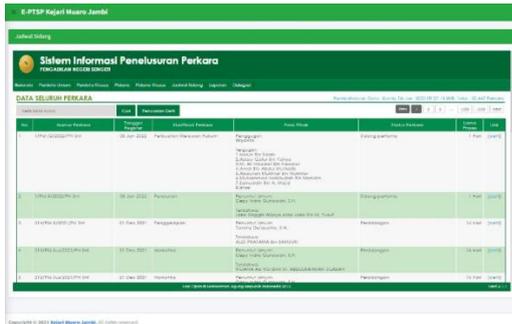
Gambar 10. Form Layanan Perdata dan Hukum Negara

6. Form Layanan Pidana Khusus

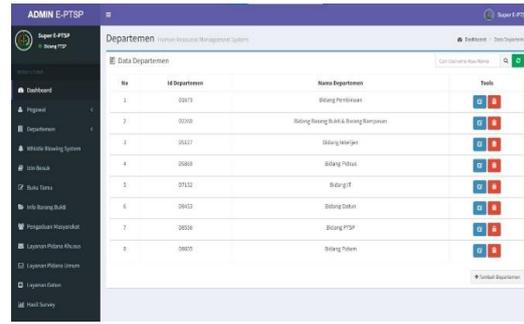
Form layanan pidana khusus digunakan untuk melakukan pengaduan terkait pidana khusus pada sistem.

9. Halaman Jadwal Sidang

Halaman jadwal sidang digunakan untuk melihat informasi tentang jadwal sidang masing-masing perkara.



Gambar 11. Halaman Jadwal Sidang



Gambar 14. Halaman Data Pengaduan

10. Halaman Dashboard Admin

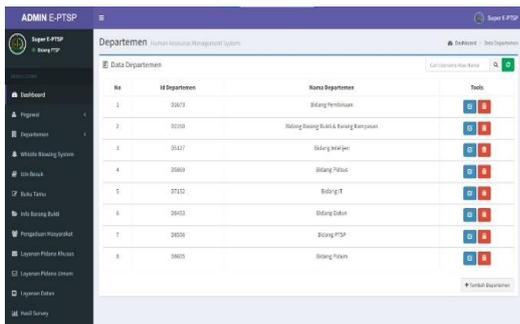
Halaman dashboard admin digunakan oleh admin untuk menjawab semua pengaduan yang ada pada EPSTP Kejaksaan Muaro Jambi.



Gambar 12. Halaman Dashboard Admin

11. Halaman Data Departemen

Halaman data departemen digunakan oleh admin untuk menambah data departemen yang ada pada EPSTP Kejaksaan Muaro Jambi.



Gambar 13. Halaman Data Departemen

12. Halaman Data Pengaduan

Halaman data pengaduan digunakan oleh admin untuk mengelola data pengaduan masyarakat yang ada pada EPSTP Kejaksaan Muaro Jambi.

V. PENUTUP

Sistem informasi elektronik pelayanan terpadu satu pintu yang dibangun di Kejaksaan Muaro Jambi sangatlah bermanfaat dari sisi kinerja pegawai dan juga dari sisi masyarakat yang sekarang sudah lebih mudah melakukan pengaduan serta mendapatkan informasi yang diinginkan dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.

Sistem yang dibangun harus didukung dengan sumber daya manusia yang siap dan berkompeteren agar pelayanan melalui EPTSP ini dapat berjalan dengan lancar untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus dari setiap pelaksanaan pelayanan menggunakan EPTSP ini. Selain itu perlunya sumber daya teknologi yang harus dipenuhi seperti internet dan komputer yang layak untuk menjalankan sistem informasi yang dibangun sehingga memberikan kemudahann pegawai dalam bekerja.

DAFTAR REFERENSI

- [1] PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006. Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- [2] Jogiyanto, HM. 2005. "Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan". Edisi 2. Yogyakarta: Andi Offset.
- [3] Sutabri, Tata. 2012. "Analisa Sistem Informasi". Yogyakarta : Penerbit Andi.
- [4] Susanto. 2013. "Sistem Informasi Akuntansi". Bandung: Lingga Jaya.
- [5] Kadir A. 2014. "Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi". Andi.Yogyakarta.
- [6] Hardiyansyah. 2011. "Kualitas Pelayanan Publik". Yogyakarta: Gava Media
- [7] Pratama, Rizky Hersya., Hakim, Abdul dan Shobaruddin. Muhammad. 2012. "Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (E-Rt/Rw) Di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya". Jurnal Administrasi Publik (JAP). 3(12): 2128-2134.

- [8] Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *“Manajemen Pelayanan”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Effendi, Taufiq. 2008. *“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera)”*. Semarang: Universitas Diponegoro

Nama : Novri Adhiatma, M.Kom
 NIDN : 1019119001
 TTL : Rumbai Jaya/19 November 1990
 Jabatan Fungsional : Asistem Ahli
 Pend. Terakhir : S2 (Magister Ilmu Komputer)
 Bidang Keahlian : Ilmu Komputer

Nama : Muhammad Ikhsan, M.Kom
 NIK : 1026119001
 TTL : Sekungkung /26 Nopember 1990
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Pend. Terakhir : S2 (Magister Ilmu Komputer)
 Bidang Keahlian : Ilmu Komputer

IDENTITAS PENELITI

Nama : Fery Purnama, M.Kom
 NIDN : 1025098901
 TTL : Jambi, 25 September 1989
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Pend. Terakhir : S2 (Magister Ilmu Komputer)
 Bidang Keahlian : Ilmu Komputer